



PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PANDEMI COVID-19



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
dr. Kaisar Razak, Sp.An., M.H.

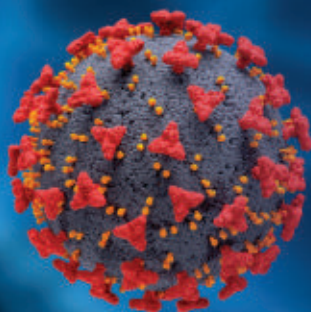
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN **PANDEMI COVID-19**

Penyakit virus Corona adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Corona. Seluruh penjuru dunia sedang dilanda wabah virus Corona yang melumpuhkan dunia kesehatan dan ekonomi. Diakibatkan oleh penyakit yang disebut Covid-19 (coronavirus disease 2019) oleh WHO (World Health Organisation). Sedangkan virusnya dinamakan SARS-CoV-2.

Untuk menyikapi penularan penyakit yang dikategorikan sebagai wabah yang mengancam kehidupan manusia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pada penjelasan atas Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa masalah wabah dan penanggulangannya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya kesehatan secara nasional yang sangat berkaitan dengan sektor lainnya di luar kesehatan, serta tidak terlepas dari keterpaduan pembangunan nasional. Maka dari itu, perlu adanya tindakan untuk pencegahan dan pengendalian supaya virus Covid-19 tidak menyebar.

Dalam buku ini akan dipaparkan secara rinci dari awal munculnya Covid-19. Apa itu Virus Corona? Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani virus Corona baik dari pusat sampai ke daerah? Bagaimana penanganan Covid-19 di daerah? Hal-hal tersebut akan di bahas dalam bab 1 buku ini.

Selain itu, hubungan antara teori fungsi, kewenangan, dan efektivitas hukum saling berkaitan dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah untuk manangani adanya Covid-19 (bab 2). Kemudian, akan dipaparkan mengenai gambaran umum lokasi kajian, dan pelaksanaan fungsi Pemda dalam penanganan Pandemi Covid-19 (bab 3-4). Terakhir, akan disimpulkan hasilnya melalui bagian penutup (bab 5). Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa saat ini sangat penting untuk selalu menjaga dan mematuhi peraturan protokol kesehatan (prokes) di era Pandemi Covid-19.



PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.

Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.

dr. Kaisar Razak, Sp.An., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19

Penulis : Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
dr. Kaisar Razak, Sp.An., M.H.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-5251-42-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19.**" Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penyakit virus corona adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Seluruh dunia sedang dilanda bencana kesehatan yang melumpuhkan dunia kesehatan dan ekonomi diakibatkan oleh penyakit ini, yang disebut dengan penyakit COVID-19 (corona virus disease 2019) oleh WHO (*World Health Organisation*). Dalam menyikapi penularan penyakit yang dikategorikan sebagai wabah yang mengancam kehidupan manusia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Peraturan tertulis mulai dari undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (PERDA) dan peraturan tertulis lainnya. Sedangkan peraturan yang tidak tertulis berupa ajakan dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat yang berisi larangan dan himbauan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Sehingga buku ini akan mencoba membahas mengenai penanganan dan Pengendalian pandemic Covid-19.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Virus Corona	1
B. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19.....	3
C. Penanganan Covid-19 di Daerah.....	6
BAB 2 TEORI FUNGSI, KEWENANGAN DAN EFEKTIFITAS HUKUM.....	12
A. Teori Fungsi.....	12
B. Teori Kewenangan.....	18
C. Teori Efektivitas Hukum.....	27
D. Kebijakan Pemerintah Daerah	34
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	34
2. Asas-Asas Otonomi Daerah.....	35
3. Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Daerah.....	35
4. Kebijakan Publik.....	37
BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI KAJIAN	43
A. Kabupaten Kolaka Utara	43
B. Kabupaten Gowa.....	46
BAB 4 PELAKSANAAN FUNGSI PEMDA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19.....	50
A. Regulasi.....	50
B. Sosialisasi.....	66
C. Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pemda dalam Penanganan Pandemi Covid-19...	74
1. Faktor Sumber Daya Manusia	74
2. Faktor Sarana dan Prasarana	76
BAB 5 PENUTUP.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Virus Corona

Penyakit virus corona adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Seluruh dunia sedang dilanda bencana kesehatan yang melumpuhkan dunia kesehatan dan ekonomi diakibatkan oleh penyakit ini, yang disebut dengan penyakit COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) oleh WHO (*World Health Organisation*). Sedangkan virusnya dinamai SARS-CoV-2.¹

Corona dalam bahasa Inggris “*crown*” artinya mahkota. Sebutan ini diambil dari struktur dinding virus yang memiliki duri atau “*spike*” yang mengelilingi sel, sehingga berbentuk mirip mahkota. Virus corona, baik SARS, MERS atau SARS CoV-2 pada dasarnya adalah virus zoonotik, artinya dalam kondisi normal terdapat pada hewan. Dengan kemampuannya bermutasi (merubah komposisi DNA dan sifat), akhirnya dapat menginfeksi sel manusia. Khusus untuk SARS-CoV-2, berdasarkan hasil analisis genetika, para ahli menyatakan bahwa virus ini berasal dari mutasi virus yang ditemukan di kelelawar di Cina bagian selatan, tepatnya di kota Wuhan.²

Wabah infeksi corona yang saat ini terjadi bermula disana. Awalnya pada akhir Desember 2019 ada sejumlah orang yang mengalami infeksi paru-paru (*pneumonia*), yang dilaporkan sebagai *pneumonia atipikal*. *Atipikal* artinya tidak serupa dengan yang pernah ada sebelumnya, karena perburukan

¹ Dasdo Antonius Sinaga.2020. Virus Corona: Hal-hal apa yang perlu diketahui. Ketua Perhimpunan Dokter Kardiovaskular se-Indonesia (PERKI) cabang Riau-Pekanbaru. Hal.1

² *Ibid.*

BAB 2

TEORI FUNGSI, KEWENANGAN DAN EFEKTIFITAS HUKUM

A. Teori Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut *The Liang Gie* yaitu rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat, yaitu sebagai aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.¹⁶

Fungsi Kepala Daerah Dalam sistem pemerintahan daerah adanya pembagian kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif dan pemerintah daerah/kepala daerah sebagai badan eksekutif. Kedua lembaga penyelenggara pemerintah daerah memiliki hubungan kerjasama serta saling tidak menjatuhkan dan kesetaraan satu dengan yang lainnya.¹⁷

Menurut penjelasan umum Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala

¹⁶ Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Tesis, 2008.

¹⁷ H. Ismail Mz. *Kajian Yuridis Tentang Peran, Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi*. Ganeç Swara Vol. 11 No.2 September 2017. Hal.16

BAB 3

GAMBARAN UMUM LOKASI KAJIAN

A. Kabupaten Kolaka Utara

Kabupaten Kolaka Utara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis Kabupaten Kolaka Utara berada pada Koordinat 020 00' - 050 00' Lintang Selatan dan 1200 45' - 1210 60' Bujur Timur, mencakup luas daratan dan pulau-pulau kecil seluas ± 3.391,62 Km². Selain itu, juga memiliki wilayah perairan laut membentang sepanjang Teluk Bone, seluas + 12.376 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:⁵⁷

1. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulawesi Selatan).
2. Sebelah Timur : Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka
3. Sebelah Barat : Perairan Teluk Bone
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Kolaka dan Perairan Teluk Bone

Dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Kolaka Utara ini memiliki prospek pengembangan yang sangat strategis, karena selain berada pada jalur lintasan ekonomi regional (Jalan Trans Sulawesi) juga berbatasan langsung

⁵⁷

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm_/DOCRPIJM_30af57a9fe_BAB%20IIBAB%202.pdf, diakses 12 Juli 2021.

BAB 4

PELAKSANAAN FUNGSI PEMDA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

A. Regulasi

Sejak awal tahun 2020 semua pemerintah daerah disibukkan dengan penanganan pandemi covid-19 yang dikenal juga dengan istilah virus corona. Pandemi Virus Corona (covid-19) sejak awal munculnya menghentak semua elemen dalam suatu Negara, termasuk Pemerintah Daerah, sebab kemunculannya tidak disertai dengan rumus baku dalam penanganannya. Semua Negara berusaha menangani persoalan pandemi ini dengan cara dan strategi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil kebijakan dalam upaya penanganan virus corona (covid-19).⁶⁵

Berbagai regulasi dan peraturan hukum telah diterbitkan sebagai respon terhadap pandemi covid-19. Indonesia adalah negara yang berusaha menangani pandemi Covid-19 dengan istilah PSBB, yaitu; Strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar. Strategi ini dipilih dengan pertimbangan yang berdasar pada Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kondisi kedaruratan Kesehatan yang tersebar, meluas secara cepat dan massif ke seluruh wilayah Indonesia mendorong sejumlah pemerintah daerah melakukan langkah

65 <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses, 15 Juli 2021.

BAB

5

PENUTUP

Pandemi Virus Corona (covid-19) yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 telah menghentak semua warga dunia, termasuk menghentak semua elemen di suatu Negara. Kajian terkait penanganan pandemi covid-19 yang dilakukan di Kab. Kolaka Utara dapam menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara dan Kab. Gowa telah menjalankan fungsi pemerintahan dalam penanganan pandemi covid-19 dengan membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta melakukan edukasi terkait pademi covid-19 kepda masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintah meliputi Suberdaya Manusia (SDM) dari tenaga Kesehatan sangat terbatas, di dalam penanganan pademi tersebut perlu di lakukan modifikasi sarana dan prasarana untuk menjadikan sarana yang sesuai dengan standar penanganan covid-19, dan yang terakhir terkait anggaran dari pemerintah yang telah melakukan realokasi dengan refocusing anggaran untuk menanggulangi pandemi covid-19. Keterbatasan SDM yang dimaksudkan adalah keterbatasan jumlah dokter dan tenaga perawat baik di Kab. Kolaka Utara maupun di Kab. Gowa. Keterbatasan sarana dan prasarana terkait dengan keterbatasan Rumah Sakit Rujukan pasien covid-19, ambulance/mobil jenazah, dan keterbatasan fasilitas isolasi danruang ICU. Sedangkan terkait anggaran, pemerintah daerah Kab. Kolaka Utara dan Kab. Gowa telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran, namun karena dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 di kedua wilayah tersebut, maka anggaran yang ada (APBD) belum

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daud, Ali, Muhammad. 2011, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- H.S. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah Halim. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Hoessain, Bhenyamin. 2009, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- _____, 2006. *Hukum Administari Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- _____, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kahu, Josef Riwu. 1998, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta.
- Khairuddin, Akhmad. 2010, *Fenomena Keadilan Dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009, *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2009, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahayu, Ani Sri. 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang.
- Rauf, Rahyunir. 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan*, Zanafa Publishing.
- Razak, Abdul. 2012. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels)*. Yogyakarta, Rangkang Education.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administari Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Roro, Mas dan Lilik Ekowati. 2017, *Kemitraan dalam Otonomi Daerah*.
Inteligensia Media: Malang.
- Rozali, Abdullah. 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme
Sebagai Suatu Alternatif* Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.
- Sarundajang, *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*, Cet. Ke-3, Pustaka
Harapan, Jakarta.
- Sarundajang. 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar
Harapan, Jakarta.
- Sirajudin, et al., 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*,
Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV.
Ramadja Karya, Bandung.
- Subarsono, A.G., 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar.
- Sunarno, Siswanto. 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,
Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriatna, Tjahya. 1992, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*,
Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Syaukani dkk., 2012, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, Cetakan IX.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi
Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara
Indonesia*. Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Wastiono, Sadu, dkk. 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus
Media, Bandung.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta. Bayumedia,
2008.
- Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia,
Bogor.
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, 2002.

Skripsi, Disertasi dan Thesis:

- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Tesis, 2008.
- Nuraeni, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016.
- Triepel, Heinrich. dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002.

Jurnal:

- Ginanjari, Diyar. *Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan COVID-19*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol 13 No. 1.
- Hamid, Abdul. *Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal AcadEMICA Fisip Untad, Vol.03 No. 01 Februari 2011.
- Haniru, La Ode. *Analisis Hukum Kewenangan Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Aparatur Daerah*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 No. 1 Desember 2016.
- Thahir, B. (2019). *Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Media Birokrasi, 175-185.
- Ariyanto, B. (2020). *Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2), 37-57.
- Saleh, Kausar Ali, *Mengelola Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.40, No.55, Maret 2017, hlm. 6294.
- Susanto, Sri Nur Hari, *Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 4, November 2019, hlm.636.
- Wijayanti, S. N. (2016). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-*

- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186-199.*
- Lathif, Nazaruddin. *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Puasa, Rafly Rilandi dkk. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1 Tahun 2018.
- Suryadi, *Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat*, Journal of Rural and Development Volume I No. 2 Agustus 2010.
- Tuwu, Darmin. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Journal Publicuho, Volume 3 Number 2 May-July 2020.
- Darmin Tuwu. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Journal Publicuho, Volume 3, Number 2, Tahun 2020. Hal.268-269.
- Ardika Nurfurqon. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*. Jurnal Yustika, Vol. 23, No.01, Juli 2020.
- Leo Agustino. *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator, Vol.16 No.2.
- Sri Nur Hari Susanto, *Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 4, November 2019.
- Wijayanti, S. N. (2016). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186-199.
- Thahir, B. (2019). *Paradigma Dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Media Birokrasi, 175-185.
- Ariyanto, B. (2020). *Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2), 37-57.
- Fitria Chusna Farisa. *Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako*". Diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

Rafly Rilandi Puasa, dkk. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

Website Internet:

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_30af57a9fe_BAB%20IIBAB%202.pdf, diakses 12 Juli 2021.

Melihat Wilayah Geografis Kabupaten Kolaka Utara, dalam <https://kolutkab.go.id/wilayah-kolaka-utara> , diakses 12 Juli 2021.

Kabupaten Kolaka Utara dalam (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kolaka_Utara), diakses 12 Juli 2021.

Serafica Gischa "Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah" dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/08/190000169/peran-pemerintah-daerah-dalam-otonomi-daerah?page=all>, akses, 13 Juli 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses, 15 Juli 2021.

<https://sumeks.co/pemda-bentuk-timsus-pencegahan-virus-corona/>, diakses 13 Juli 2021.

Salsabiila Tiara Aulia, "Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?" dalam <https://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>, diakses 9 Juli 2021

Alfian Putra Abdi, dan Rio Apinino, "Memungguni Pemda, Pemerintah Pusat Monopoli Penanganan Corona", <https://tirto.id/memungguni-pemda-pemerintah-pusat-monopoli-penanganan-corona-eEZm>, diakses 10 Juli 2021.

Andrian Pratama Taher, "Positif Corona Bertambah 17 Orang, Kasus Jadi 134 per 16 Maret 2020", <https://tirto.id/positif-corona>

[bertambah-17-orang-kasus-jadi-134-per-16-maret-2020-eFul](#),
2 Juli 2021.

Dipna Videlia Putsanra, “*Apa Itu Social Distancing dan Karantina Diri untuk Cegah Corona*”, <https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9>, diakses Juli 2021.

Salsabiila Tiara Aulia, “*Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?*” dalam <https://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>, diakses 9 Juli 2021

CNN Indonesia, “*Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2>, diakses Juli 2021.

SE Mendagri Covid-19,
https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2020/SURAT%20EDARAN%20MENDAGRI/SE_Mendagri_COVID-19.pdf, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

<https://dinkes.sultraprov.go.id/info-Covid-19-sultra/>, di akses pada tanggal 15 Februari 2021.

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_30af57a9fe_BAB%20IIBAB%202.pdf, diakses 12 Juli 2021.

Melihat Wilayah Geografis Kabupaten Kolaka Utara, dalam <https://kolutkab.go.id/wilayah-kolaka-utara> diakses 12 Juli 2021.

Kabupaten Kolaka Utara dalam “https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kolaka_Utara”, diakses 12 Juli 2021.

<https://gowakab.bps.go.id/pressrelease/2021/05/21/73/hasil-sensus-penduduk-2020-wilayah-kabupaten-gowa.html>, akses 17 Juli 2021.

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1480391285BAB_6_Profil_Kabupaten_Gowa_ok.pdf, akses 17 Juli 2021.

Serafica Gischa "Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah" dalam

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/08/190000169/peran-pemerintah-daerah-dalam-otonomi-daerah?page=all>, akses, 13 Juli 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses, 15 Juli 2021.

<https://berita.kolutkab.go.id/tidak-pakai-masker-denda-hingga-satu-juta-menanti-warga-kolaka-utara/> Data Badan Keuangan Daerah Kab. Gowa Tahun 2020.

<https://sumeks.co/pemda-bentuk-timsus-pencegahan-virus-corona/>, diakses 13 Juli 2021.

Salsabiila Tiara Aulia, "Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?" dalam <https://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>, diakses 9 Juli 2021.

Alfian Putra Abdi, dan Rio Apinino, "Memungguni Pemda, Pemerintah Pusat Monopoli Penanganan Corona", <https://tirto.id/memungguni-pemda-pemerintah-pusat-monopoli-penanganan-corona-eEZm>, diakses 10 Juli 2021.

Dipna Videlia Putsanra, "Apa Itu Social Distancing dan Karantina Diri untuk Cegah Corona", <https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9>, diakses Juli 2021.

CNN Indonesia, "Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona", dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2>, diakses Juli 2021.

<https://mediaindonesia.com/opini/300361/implementasi-fungsi-perlindungan-pemerintah-dalam-kasus-covid-19>, akses 29 September 2021.

Makalah:

Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

Nuraeni, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016.

Retnami, Setya. 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta.

Dasdo Antonius Sinaga. *Virus Corona: Hal-hal apa yang perlu diketahui*. Ketua Perhimpunan Dokter Kardiovaskular se-Indonesia (PERKI) Cabang Riau-Pekanbaru. 2020.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan

Kuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Bupati Kolaka Utara No. 443/69 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 di Kab. Kolaka Utara

SK Bupati Kolaka Utara No. 360/119 tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Kab. Kolaka Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 02 Tahun 2020 tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII.

Wawancara:

Wawancara dengan Andi Setiawan, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kab. Kolaka Utara.

Wawancara dengan Mahmuddin, Kepala Bagian Biro Hukum Kab. Gowa.

Wawancara Ketua Satgas Covid-19 Rumah Sakit Daerah Kolaka Utara.

Hasil Wawancara dengan Syarif Nur, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kab. Kolaka Utara.

Wawancara dengan Andi Setiawan, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kab. Kolaka Utara.

Hasil Wawancara dengan dr. Syarif Nur, M.Kes, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kab. Kolaka Utara.

Hasil Wawancara dengan dr. Seniman Syamsu Sp.PD, Ketua Satgas Covid-19 Rumah Sakit Daerah Kab. Kolaka Utara.

Wawancara dengan Suhirman, Ketua Satgas Covid-19 di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, tanggal 21 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Syarif Nur tanggal 12 Juni 2021 di Konawe, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kab. Kolaka Utara.